

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Pengembangan Desa Padabeunghar Menjadi Desa Penyangga Wisata

Nining Wahyuningsih¹, Diana Djuwita^{2*}

Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati

¹e-mail: niningwningsih30@gmail.com

²e-mail: dianadjuwita12@gmail.com

*Corresponding author

ABSTRAK

Pemandangan alam yang begitu indah dan adanya objek wisata menjadikan Desa Padabeunghar layak ditetapkan sebagai desa penyangga wisata di Kabupaten Kuningan. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan wisata adalah objek wisata yang ada saat ini pengelolanya tidak dilakukan oleh masyarakat setempat. Untuk menggali dan menemukan motivasi dan harapan masyarakat desa, Tim Pengabdian menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) sebagai instrumen metode pengabdian yang digunakan. Hasil identifikasi potensi wilayah dan masyarakat desa Padabeunghar diklasifikasikan dalam potensi aset individu, aset fisik dan sumber daya alam, aset budaya dan keagamaan, aset ekonomi, dan aset modal sosial. Harapan-harapan masyarakat Desa Padabeunghar dalam memanfaatkan potensi aset yang dimilikinya, antara lain perbaikan infrastruktur dan akses jalan, menciptakan wisata yang religius, mendata lokasi di desa yang potensial namun belum dikelola, pengelolaan BUMDES yang baru terbentuk, adanya hiburan untuk wisatawan, *home industry* yang sudah ada dikembangkan, sosialisasi objek wisata agar dikenal lebih luas oleh masyarakat. Pola Pendampingan yang sesuai untuk mendukung Desa Padabeunghar menjadi desa penyangga wisata yaitu pelatihan dan pendampingan BUMDES dalam bidang tata kelola BUMDES dan pelatihan sistem perencanaan yang baik.

Kata Kunci: Wisata, Pemberdayaan, *Asset Based Community Development*

ABSTRACT

The beautiful natural scenery and the presence of tourist objects make Padabeunghar Village worthy of being designated as a tourism buffer village in Kuningan Regency. The problem in tourism development is that the current tourist attraction is not managed by the local community. To explore and find the motivation and expectations of the village community, the Service Team uses the ABCD (Asset-Based Community Development) approach as an instrument of the service method used. The results of the identification of the potential of the area and community of Padabeunghar village are classified into potential individual assets, physical assets and natural resources, cultural and religious assets, economic assets, and social capital assets. The expectations of the people of Padabeunghar Village in utilizing the potential assets they have, include improving infrastructure and access roads, creating religious tourism, recording locations in villages that have potential but have not been managed, management of the newly formed BUMDES, entertainment for tourists, a home industry that already developed, socialization of tourist objects to be known more widely by the public. The appropriate pattern of assistance to support Padabeunghar Village to become a tourism support village is training and assistance for BUMDES in the field of BUMDES governance and training on good planning systems.

Keywords: *Tourism, Empowerment, Asset Based Community Development*

PENDAHULUAN

Kabupaten di Jawa Barat dengan potensi sektor pariwisata yang besar adalah Kabupaten Kuningan. Menurut data BPS Kabupaten Kuningan (2021) jumlah wisatawan domestik masih mendominasi kunjungan ke Kabupaten Kuningan yaitu sebesar 99% dan hanya 1% wisatawan yang berasal dari mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kuningan selama tiga tahun terakhir mencapai 11.220.250 jiwa. Jika dilihat berdasarkan kegiatan wisatawan maka wisatawan tidak hanya sekedar berkunjung ke Kabupaten Kuningan, melainkan juga melakukan kunjungan ke Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA). Jumlah wisatawan yang berkunjung ke ODTWA setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, kecuali ditahun 2020. Jumlah pengunjung pada tahun 2019 merupakan jumlah kunjungan tertinggi sebanyak 2.328.359 jiwa atau meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.147.807 jiwa.

Salah satu ODTWA yang menjadi primadona wisata di Kabupaten Kuningan adalah Kebun Raya Kuningan (KRK) yang terletak di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan. Desa Padabeunghar yang menjadi kawasan KRK memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Hal tersebut sesuai dengan arahan Bupati Kuningan yang menetapkan 25 desa wisata yang akan direalisasikan dalam periode tahun 2018 – 2023. Desa Padabeunghar dalam periode tersebut masuk dalam kategori desa penyangga wisata.

Namun realisasi desa wisata tersebut menghadapi kendala terutama pada pandang masyarakat tentang pariwisata. Masyarakat Desa Padabeunghar yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan penggarap kebun, menganggap sektor pariwisata bukan merupakan prospek unggulan dari sisi ekonomi. Mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh walaupun sebenarnya di daerah tersebut banyak potensi pariwisata yang perlu dikembangkan. Sehingga kesadaran akan pentingnya pariwisata ini belum tertanam dalam diri warga masyarakat (Wahyuningsih dan Djuwita, 2019). Temuan tersebut mendukung hasil penelitian Ryenaldy (2014) bahwa keberadaan KRK dipandang masyarakat tidak menguntungkan. Lahan yang digunakan oleh KRK dulunya sering digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat merasa kehilangan mata pencaharian. Selain itu, pembangunan KRK sangat sedikit melibatkan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasa kecewa untuk berkontribusi dalam membentuk Desa Padabeunghar menjadi desa wisata.

Metode dalam pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakkan potensi yang dimiliki masyarakat adalah *Asset Based Community Development* (ABCD). Metode ABCD adalah menitikberatkan pada partisipasi yang lebih oleh masyarakat lokal dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan. Masyarakat lokal harus diikutsertakan dalam tahapan perencanaan,

pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan (Dureau, 2013).

Beberapa kajian yang menggunakan metode ABCD sebagai metode pemberdayaan seperti dilakukan oleh Maulana (2019), Nafisah & Ansori, (2019); Suksmawati, Alidyan, Roziana, & Firdaus (2020). Kajian yang dilakukan Kristanto & Putri (2021), konsep ABCD pada wisata kebugaran (di daerah perkebunan teh Kemuning dan juga Wonosari) dapat dicapai dengan sinergitas antara masyarakat, potensi, dan juga pihak-pihak pendukung seperti pemerintah dan juga pihak swasta akan menjadi kolaborasi yang optimal dalam pengembangan wisata kebugaran.

Tujuan dari kajian ini antara lain (1) mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayah Desa Padabeunghar; (2) mengidentifikasi harapan masyarakat Desa Padabeunghar dalam memanfaatkan aset dan potensi yang dimilikinya; dan (3) menyusun pola pendampingan yang sesuai untuk mendukung pengembangan Desa Padabeunghar menjadi desa penyangga wisata.

BAHAN DAN METODE

Pendekatan yang akan dilakukan dalam rangka pendampingan masyarakat dalam mewujudkan Desa Padabeunghar menjadi desa penyangga wisata yaitu metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Menurut Salahudin (2015), sebagai sebuah pendekatan, metode ABCD adalah jenis pendekatan kritis yang masuk dalam lingkup pengembangan masyarakat berbasis pada kekuatan dan aset yang dipunyai masyarakat. Sebuah pendekatan yang sangat menekankan kepada kemandirian masyarakat dan terbangunnya sebuah tatanan dimana warga aktif menjadi pelaku dan penentu pembangunan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan pendampingan menggunakan metode ABCD mencakup lima tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut (Salahuddin, 2015:45-70):

1. Menemukan (*Discovery*)

Adalah proses yang dilakukan secara mendalam untuk menemukan hal positif (pengalaman) yang ada dan pernah dilalui oleh komunitas dalam masyarakat. Teknik yang digunakan berupa observasi, partisipasi aktif (wawancara) dan dokumentasi. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan wawancara antara lain BUMDesa, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian wisata. Hasil dari tahap *discovery* ini selanjutnya dilakukan analisis oleh Tim Pengabdian.

2. Impian (*Dream*)

Masyarakat secara bersama-sama dan kreatif dapat mengeksplorasi harapan dan impiannya untuk mewujudkan visi bersama. Impian masyarakat tersebut digali melalui proses wawancara. Pada tahap ini Tim menginventaris dan memetakan daftar harapan yang telah disampaikan oleh komunitas masyarakat untuk selanjutnya disusun pola yang terstruktur.

3. Menentukan (*Define*)

Tim Pengabdian mencoba melokalisir aset yang ada di Desa Padabeunghar, guna pengembangan program lebih lanjut dengan melakukan FGD. Pada tahap ini, selain mengadakan FGD Tim juga memanfaatkan data profil Desa Padabeunghar dan dokumen-dokumen lain hasil observasi yaitu berupa foto dan video untuk dapat memetakan aset yang dimiliki dan dapat dikembangkan.

4. Merancang (*Design*)

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat untuk merencanakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki dengan cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam merancang program pengabdian antara lain penyuluhan sosial, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Bentuk pengabdian yang digunakan Tim adalah pendampingan kepada masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian adalah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Ketua BUMDesa dan anggotanya, karang taruna dan masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pengembangan wisata Desa Padabeunghar. Dalam kegiatan tersebut, Tim mengundang narasumber yang memiliki pengalaman dan sukses dalam mengembangkan potensi wisata desa.

5. Lakukan (*Destiny*)

Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung continuous improvement untuk mewujudkan impian masyarakat dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki. Pada tahap ini Tim Pengabdian melakukan proses monitoring pada kegiatan pendampingan untuk mengontrol capaian program pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan Kuningan

Desa Padabeunghar terletak di ketinggian 300-500 meter di atas permukaan laut dengan luas keseluruhan wilayah mencapai 1.632,61 Ha, dengan 1.268 Ha merupakan lahan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Berdasarkan data luas wilayah tersebut, nampak bahwa

wilayah Desa Padabeunghar didominasi oleh BTNGC yang berarti sebagian besar merupakan wilayah konservasi (Profil Desa Padabeunghar, 2019). Jumlah penduduk Desa Padabeunghar per tahun 2019 tercatat sebanyak 2.420 jiwa, yang tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Margahayu, Dusun Margamulya, dan Dusun Margamukti.

Potensi objek wisata yang terdapat di Desa Padabeunghar, diantaranya Batu Luhur (di Dusun Margamulya), Cibujangga (di Dusun Margamulya), Curug Ciguntur (di Dusun Margamukti), dan Kebun Raya Kuningan (di Dusun Margamulya). Desa Padabeunghar juga memiliki tiga buah danau yaitu Situ Tespon, Situ Cibuntu, dan Situ Lurah.

Potensi Masyarakat dan Wilayah Desa Padabeunghar

Desa Padabeunghar sebagai salah satu desa di Kecamatan Pasawahan memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Kuningan. Di dalam maupun di sekitar Desa Padabeunghar banyak dijumpai objek wisata alam seperti Kebun Raya Kuningan, Bukit Seribu Bintang, Batu Sepur, Rock Garden, dan lain-lain. Namun tidak ada satupun objek wisata tersebut yang dikelola oleh Desa Padabeunghar. Manfaat adanya objek wisata belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desa Padabeunghar karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan objek wisata tersebut. Oleh karena itu Desa Padabeunghar saat ini lebih sesuai menjadi desa penyangga wisata.

Ada banyak *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Padabeunghar, diantaranya adalah pemerintah desa, karang taruna, masyarakat, kelompok penggerak pariwisata (KOMPEPAR), dan perguruan tinggi setempat. Di tahun 2019 dilakukan penelitian mengenai perencanaan desa wisata dengan pendekatan *community based tourism* (CBT), kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan atau pendampingan masyarakat Desa Padabeunghar sebagai desa penyangga wisata. Program pendampingan masyarakat menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD).

Metode ABCD dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann juga pendiri The Asset-Based Community Development (ABCD) Institute. McKnight dan Kretzmann (1993) mengemukakan ada 6 (enam) prinsip yang menjadi pegangan para pemberdaya masyarakat lokal demi untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan, yakni (1) apresiasi; (2) partisipasi; (3) psikologi positif; (4) deviasi positif; (5) pembangunan dari dalam; dan (6) hipotesis heliotropik. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam pendekatan laku oleh para *local enabler* pada 3 (tiga) periode kehidupan masyarakat lokal, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (Dureau, 2013). Menurut pendekatan ABCD seorang pemberdaya masyarakat lokal harus mampu menemukan sisi positif dari semua tantangan-

tantangan pemberdayaan (Dwiridhotjahjono, dkk. 2020). Termasuk jika ditemukan adanya kekurangan dalam hal kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada dalam masyarakat tersebut.

Metode ABCD terdiri dari 5 (lima) tahapan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu *discovery, dream, design, define, dan destiny* (Salahuddin, 2015). Tahap *discovery* adalah proses pencarian yang mendalam tentang hal-hal positif, hal-hal terbaik yang pernah dicapai, dan pengalaman-pengalaman keberhasilan di masa lalu. Proses ini dilakukan melalui wawancara apresiatif dengan beberapa kelompok masyarakat seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, karang taruna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kelompok penggerak pariwisata (KOMPEPAR), dan pemerintah desa (Panduan KKN ABCD, 2015). *Discovery* adalah tahap awal berupa penemuan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat juga wilayah tempat tinggalnya.

Potensi wilayah dan masyarakat Desa Padabeunghar dikelompokkan menjadi potensi aset individu, potensi aset fisik dan sumber daya alam, potensi aset budaya dan keagamaan, aset ekonomi, dan aset modal sosial. Sektor individu merupakan langkah awal mewujudkan ABCD. Proses pemberdayaan masyarakat diawali dengan mengenali setiap individu dalam kelompok secara mendasar dan detail agar proses inventarisasi dan pemetaan potensi yang dimiliki individu dalam mengembangkan masyarakat akan menjadi optimal (McKnight, 2017). Pemetaan potensi individu untuk mengembangkan sektor pariwisata menjadi suatu hal yang penting (Kristanto & Putri, 2021).

Potensi aset individu yang dimiliki masyarakat Desa Padabeunghar diantaranya, keterlibatan sebagian masyarakat dalam kegiatan penghijauan hutan di Kebun Raya Kuningan. Potensi aset individu lainnya dimiliki oleh Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) yang mana pernah mendapatkan pelatihan kepariwisataan khususnya terkait penghijauan, pemeliharaan alam, penataan alam, serta perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan yang baik.

Proses pemetaan aset individu ini akan menggeser individu dari kegiatan kolektif menjadi organisasi terstruktur yang berdasarkan pada karakteristik masing-masing individu dalam memenuhi perannya ketika memaksimalkan potensi wisata di desanya (Kristanto & Putri, 2021). Sebagaimana yang dilakukan oleh KOMPEPAR, didalamnya ada banyak pemuda desa yang bergerak bersama untuk memajukan pariwisata. Namun, KOMPEPAR bergerak atas nama pribadi bukan masyarakat.

Potensi aset fisik dan sumber daya alam yang dimiliki Desa Padabeunghar diantaranya terdapat pemandangan alam yang indah dan asri. Sarana dan prasarana yang ada sebenarnya memadai dan mendukung sektor pariwisata, namun akses jalan yang ada kondisinya sempit, sehingga sulit dilewati kendaraan-kendaraan besar seperti bus. Padahal banyak sekali rombongan

wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata yang ada di sekitar Padabeunghar namun kendaraan (bus) yang digunakan tidak dapat melewati akses jalan yang tersedia.

Pemetaan aset budaya dan keagamaan didapatkan bahwa di Desa Padabeunghar ada beberapa atraksi dan kebiasaan masyarakat yang masih berjalan seperti budaya sedekah bumi, hajat bumi, adanya kelompok reog, pertunjukan wayang kulit, jaipongan, dan kegiatan keagamaan, seperti tahlilan dan majelis ta'lim.

Pemetaan aset ekonomi Desa Padabeunghar meliputi adanya *home industry* di masyarakat yang memproduksi makanan khas Desa Padabeunghar dan makanan ringan (keripik, emping, dan jamu), karena Desa Padabeunghar banyak menghasilkan melinjo, sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat. Selain itu aset ekonomi lainnya berupa kerajinan tangan dan aksesoris, serta baru saja terbentuknya BUMDES.

Pemetaan modal sosial diantaranya masih adanya kebiasaan gotong royong di kalangan masyarakat Desa Padabeunghar, masyarakat memiliki tata krama dan sopan santun, serta adanya kerjasama (saling bantu membantu) di kalangan masyarakat.

Pada tahap *discovery* ini, fasilitator juga melakukan studi banding ke BUMDES Arya Kemuning yang mengelola objek wisata Telaga Biru Cicereum di Desa Kaduella Kecamatan Pasawahan yang juga merupakan tetangga Desa Padabeunghar. Studi banding ini dilakukan untuk menemukan kisah sukses yang dapat dijadikan motivasi bagi masyarakat Desa Padabeunghar. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan semangat dan optimisme masyarakat dalam perencanaan desa Padabeunghar menjadi desa penyangga wisata.

Setelah studi banding, maka ketua BUMDES dihadirkan sebagai narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) di Desa Padabeunghar untuk berbagi kisah sukses mengembangkan pariwisata di desanya. Harapannya, agar masyarakat Desa Padabeunghar khususnya pengurus BUMDES, pemuda karang taruna, dan tokoh masyarakat menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti jejak kesuksesan yang telah diraih desa lain, yang juga memiliki potensi yang hampir sama.

Harapan Masyarakat Desa Padabeunghar dalam Memanfaatkan Asset dan Potensi yang Dimilikinya

Tahapan berikutnya dalam metode ABCD setelah menemukan berbagai potensi di wilayah maupun masyarakat Desa Padabeunghar, yaitu *dream*. Pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impiannya, baik untuk pribadi maupun untuk organisasi. Orang-orang memikirkan hal-hal besar dan berpikir *out of the box* serta membayangkan hasil-hasil yang ingin dicapai (Salahudin, 2015). Pada tahap ini digali harapan-harapan masyarakat terkait dengan upaya pemanfaatan aset dan potensi yang dimilikinya.

Harapan-harapan muncul dari tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum, kompepar, karang taruna, dan BUMDES. Harapan-harapan dari tokoh masyarakat diantaranya menginginkan adanya perbaikan infrastruktur dan akses jalan sehingga bisa lebih lebar sehingga dapat dilewati kendaraan-kendaraan besar seperti bus, dilakukannya pembinaan masyarakat agar lebih kreatif dan produktif, pendataan berbagai lokasi di desa yang belum dikelola namun potensial untuk dijadikan objek wisata. Harapan dari tokoh agama yaitu ingin menciptakan wisata yang religius. Sedangkan harapan BUMDES yang baru terbentuk adalah mengupayakan agar BUMDES dapat menghimpun modal dan aset masyarakat desa untuk mengembangkan dan mempertahankan objek wisata yang sudah berjalan.

Harapan-harapan masyarakat umum yaitu keinginan agar UMKM dapat beroperasi kembali pasca pandemi, menciptakan hiburan untuk para wisatawan di objek wisata yang sudah terbentuk. Masyarakat juga berharap adanya dukungan pemerintah desa untuk mengembangkan wisata di Desa Padabeunghar, menjaga kelestarian alam, *home industry* yang ada di masyarakat agar dapat dikembangkan, serta budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat terus dilestarikan.

Sedangkan harapan-harapan KOMPEPAR diantaranya pemerintah dapat mendukung dari sisi pemodalannya untuk pengembangan pariwisata, menjalin kerjasama dengan TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) dalam pemeliharaan Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA),

Karang taruna yang terdiri dari pemuda Desa Padabeunghar berharap dapat melakukan studi banding wisata alam di daerah lain agar dapat melakukan inovasi dalam bidang wisata alam, sarana prasarana terus diperbaiki, serta SDM diberikan pelatihan kepariwisataan. Karang taruna juga berharap agar parawisata di Desa Padabeunghar dapat dikenal luas oleh masyarakat di luar desanya bahkan hingga ke mancanegara, sehingga tidak hanya wisatawan domestik yang berkunjung namun juga wisatawan asing.

Penyusunan Pola Pendampingan yang Sesuai untuk Mendukung Pengembangan Desa Padabeunghar menjadi Desa Penyangga Wisata

Tahap selanjutnya dalam metode ABCD adalah *design*. Pada tahap *design*, orang-orang mulai merumuskan strategi, proses dan sistem, membuat keputusan dan mengembangkan kolaborasi yang mendukung terwujudnya perubahan yang diharapkan (*dream*). Pada tahap ini semua hal positif di masa lalu ditransformasi menjadi kekuatan untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan (Salahudin, 2015).

Berdasarkan pemetaan potensi wilayah dan masyarakat Desa Padabeunghar serta harapan-harapan masyarakat, maka dapat dirumuskan beberapa pola pendampingan yang sesuai untuk mendukung pengembangan Desa Padabeunghar menjadi desa penyangga wisata, antara lain:

1. Pendampingan *home industry* dan UMKM dalam menghasilkan produk (makanan, kerajinan, aksesoris)
2. Pendampingan pemerintah Desa Padabeunghar untuk membuat *data base* lokasi desa yang potensial untuk wisata alam namun belum dikelola
3. Pendampingan pengurus BUMDES yang baru terbentuk dalam hal pengelolaan/manajemen BUMDES agar dapat menghimpun aset, potensi, dan kreatifitas masyarakat untuk mendukung pariwisata di Desa Padabeunghar
4. Pendampingan KOMPEPAR dalam bidang pemasaran digital agar objek wisata alam yang sudah beroperasi di sekitar Desa Padabeunghar dapat dikenal luas oleh masyarakat di luar Desa Padabeunghar bahkan hingga ke mancanegara.

Beberapa pola pendampingan yang telah dirumuskan tersebut kemudian dipilih pola pendampingan yang paling sesuai dengan 7 (tujuh) paradigma dan prinsip ABCD, yaitu:

1. Setengah Terisi Lebih Berarti (*Half full and half empty*)

Modal utama dalam program pengabdian masyarakat berbasis aset adalah mengubah cara pandang komunitas terhadap dirinya. Tidak hanya terpaku pada kekurangan dan masalah yang dimiliki, tetapi memberikan perhatian kepada aset yang telah dimiliki dan apa yang dapat dilakukan terhadapnya. Paradigma dan prinsip ini mengajarkan pentingnya aset dan potensi dalam pengembangan komunitas (Salahudin, 2015).

Pada perumusan beberapa pola pendampingan, setiap kelompok pendampingan (UMKM, Pemerintah Desa, BUMDES, dan KOMPEPAR) memiliki aset masing-masing, maka semua kelompok tidak dimulai dari nol, namun sudah terisi setengahnya berupa adanya sumber daya manusia (SDM) juga kelembagaan dan beberapa SDM telah telah terlatih.

2. Semua punya potensi (*No body has nothing*)

Setiap manusia terlahir dengan keunikannya masing-masing, tidak ada yang sama, baik berupa kelebihan maupun kekurangan. Pada metode ABCD ini semua orang diarahkan untuk memiliki fokus pada kelebihannya. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki potensi. Semua orang berpotensi dan bisa berkontribusi, sehingga tidak ada alasan bagi setiap anggota komunitas untuk tidak berkontribusi nyata untuk perubahan ke arah yang lebih baik. (Salahudin, 2015)

Pada pola pendampingan yang akan dipilih, semuanya komunitas memiliki potensi dan keunikannya masing-masing, sehingga setiap komunitas punya peluang yang sama untuk diberikan pendampingan.

3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang pada pencapaian tujuan dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi juga berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk konsep (gagasan) maupun berbentuk kegiatan dengan memberi masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Salahudin, 2015).

Pada pola pendampingan yang telah dirumuskan, hanya BUMDES yang melibatkan banyak masyarakat Desa Padabeunghar, sedangkan UMKM dan *home industry* yang telah beroperasi hanya melibatkan keluarga saja, pemerintah desa hanya melibatkan aparat desa, dan KOMPEPAR hanya melibatkan sedikit pemuda desa yang tergabung dalam komunitas tersebut dan partisipasi juga manfaatnya hanya dirasakan oleh individu, tidak meluas dirasakan oleh masyarakat Desa Padabeunghar. BUMDES yang baru terbentuk tersebut merupakan badan hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

4. Kemitraan (*Partnership*)

Partnership mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "partner". Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama sebagai upaya mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

Partnership juga mengandung pemahaman adanya suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi bekerjasama untuk mencapai tujuan, mengambil peran, dan melaksanakan serta membagi tugas, bersama-sama menanggung risiko juga meraih keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara periodik dan memperbaiki kesepakatan bila diperlukan.

Partnership merupakan salah satu prinsip utama dalam pendekatan ABCD. *Partnership* merupakan modal utama yang sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan posisi dan peran masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pembangunan yang mana masyarakat menjadi motor penggerak dan pelaku utamanya (*community driven development*). Harapannya, proses pembangunan dapat memberikan

dampak *empowerment* secara masif dan terstruktur. Ini dapat terjadi jika telah terbentuk rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap pembangunan di sekitarnya dalam diri masyarakat.

Beberapa komunitas yang dijadikan target pendampingan menunjukkan bahwa BUMDES yang paling besar peluangnya untuk melakukan *partnership* dengan berbagai pihak dan elemen di masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program-program kerjanya sebagai upaya mengembangkan Desa Padabeunghar menjadi desa penyangga wisata. Berdasarkan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 bahwa kemitraan BUMDES dapat dilakukan antar BUMDES, kemitraan dengan dunia usaha, kemitraan dengan lembaga keuangan atau pembiayaan, kemitraan dengan lembaga pemerintah, dan kemitraan dengan *e-commerce*.

Selain itu, BUMDES dalam melaksanakan program kerjanya dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat desa setempat dengan pola kemitraan usaha yang jelas pembagian keuntungan dan juga risikonya. Sebagaimana pola kemitraan yang dijalankan oleh BUMDES Arya Kemuning Desa Kaduella dalam mengelola objek wisata Telaga Biru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDES yaitu Bapak Iim, BUMDES Kaduella menjalin kemitraan usaha dengan masyarakat desa setempat seperti pemberdayaan pemuda untuk bekerja di area objek wisata dengan pola kerja harian, pengadaan *home stay* bagi wisatawan bekerja sama dengan penduduk yang bersedia menyewakan rumahnya dengan ketentuan standar penginapan yang ditetapkan oleh BUMDES, kemitraan dengan masyarakat yang memiliki usaha makanan dan minuman untuk membuka warungnya di area objek wisata Telaga Biru, dan kemitraan dengan masyarakat yang memiliki usaha juga keahlian di bidang fotografi untuk menyediakan jasa layanan foto bagi pengunjung di area objek wisata. Setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan usaha akan terikat pada perjanjian usaha dan berhak mendapat keuntungan maupun menanggung kerugian. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Telaga Biru telah mencapai 200 orang lebih. Saat ini juga BUMDES Kaduella mengembangkan usaha di bidang layanan jasa keuangan (simpan pinjam) bagi masyarakat Desa Kaduella.

Maka BUMDES Padabeunghar pun dapat melakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang dilakukan oleh BUMDES Kaduella, diantaranya kemitraan dengan forum BUMDES se-Kabupaten Kuningan maupun forum BUMDES se-Jawa Barat.

Tidak hanya kemitraan dengan BUMDES lainnya, BUMDES Padabeunghar juga dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah desa untuk menghimpun aset yang dapat dikelola dan diproduktifkan, kemitraan dengan pengelola objek wisata alam di sekitar desa seperti dengan Kebun Raya Kuningan (KRK), Batu Sepur, Rock Garden, Bukit Seribu Bintang, dalam hal pengadaan SDM yang siap dilatih untuk menjadi *guide* pariwisata juga penyediaan cinderamata dan oleh-oleh khas daerah Padabeunghar bagi para wisatawan. BUMDES

Padabeunghar dapat bekerja sama dengan UMKM atau *home industry* yang sudah beroperasi di Desa Padabeunghar penghasil kerajinan maupun makanan khas desa, sehingga tidak perlu membuat tempat produksi sendiri, cukup membuat packaging (kemasan) yang menarik dan menyalurkannya ke objek-objek wisata yang ada di dalam maupun di luar Desa Padabeunghar.

Kemitraan yang dibangun BUMDES Padabeunghar dengan berbagai *stakeholders* hendaknya mengimplementasikan beberapa prinsip, diantaranya prinsip saling percaya (*mutual trust*), prinsip saling kesefahaman (*mutual understanding*), prinsip saling menghormati (*mutual respect*), prinsip kesetaraan (*equality*), prinsip keterbukaan (*transparancy*), prinsip tanggung jawab bersama (*mutual responsibility*), dan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*). Jika prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dengan baik dalam membangun kemitraan, maka akan dapat mendorong keberhasilan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Salahudin, 2015).

5. Penyimpangan positif (*Positive Deviance*)

Positive Deviance diartikan sebagai penyimpangan positif. *Positive deviance* secara terminologi adalah sebuah pendekatan terhadap perubahan perilaku individu dan sosial yang didasarkan pada realitas, bahwa dalam setiap masyarakat terdapat orang-orang yang mempraktekkan strategi atau perilaku sukses yang tidak umum. Realitas tersebut mengisyaratkan bahwa seringkali terjadi pengecualian-kecualian dalam kehidupan masyarakat dimana seseorang atau beberapa orang mempraktekkan perilaku dan strategi berbeda dari kebanyakan masyarakat pada umumnya. Realitas ini juga mengisyaratkan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki aset atau sumber daya sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan yang diharapkan.

Positive deviance merupakan modal utama dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis aset-kekuatan. Energi itu senantiasa dibutuhkan dalam konteks lokalitas masing-masing komunitas. *Positive deviance* secara implementatif didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, (1) bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki solusi. Mereka adalah ahli terbaik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya; (2) Komunitas mengatur dirinya sendiri dan memiliki sumber daya manusia dan aset sosial untuk memecahkan tantangan; (3) Adanya kecerdasan kolektif, sehingga kecerdasan dan pengetahuan tidak terkonsentrasi ke beberapa anggota masyarakat atau ahli eksternal saja, tetapi terdistribusi ke seluruh anggota masyarakat; (4) Keberlanjutan sebagai landasan pendekatan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menemukan solusi yang berkelanjutan bagi masalah yang dihadapi; (5) *Positive deviance* didasarkan pada prinsip bahwa lebih mudah

untuk mengubah *perilaku* dengan berlatih atau berbuat dengan sesuatu yang baru daripada hanya dengan sekedar mengetahui atau memahami tentang hal baru tersebut.

Sebagai tim pengabdian yang memfasilitasi proses pemberdayaan di Desa Padabeunghar harus menyadari bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki aset dan kemampuan untuk mengatasi sendiri masalahnya, sehingga kedatangan tim pengabdian hanya untuk memfasilitasi masyarakat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan *sustainable*. Oleh karena itu, tidak ada lagi anggapan bahwa kedatangan tim pengabdian ke desa sebagai “*superman*” atau “*super hero*” yang mampu memecahkan segala permasalahan yang terjadi di desa dalam waktu yang singkat.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap BUMDES bersifat fasilitatif. Tim pengabdian hanya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan BUMDES untuk menjalankan program kerjanya dalam rangka menghimpun aset-kekuatan dan menggerakkan masyarakat. BUMDES pun dalam menjalankan programnya menggunakan terminologi *positive deviance*, sehingga BUMDES tidak perlu membuat unit-unit usaha baru yang sudah ada di masyarakat, namun cukup menghimpun mengembangkan aset-aset yang ada di masyarakat dengan menggunakan pola kemitraan. BUMDES menyadari dan mengakui bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kreatifitas untuk mengatasi permasalahannya, sehingga BUMDES hanya membantu menghimpun aset-aset dan kekuatan yang ada di masyarakat, melatih, mengembangkan, dan membuat jaringan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan.

6. Berasal dari dalam masyarakat (*Endogenous*)

Endogenous secara bahasa berarti dari dalam. Pembangunan *endogen* berarti pembangunan yang dikembangkan dari dalam masyarakat, sehingga muncul istilah *local endogenous*, yang berarti pembangunan dari dalam komunitas tertentu atau masyarakat.

Endogenous dalam konteks pembangunan memiliki beberapa konsep inti yang menjadi prinsip dalam pendekatan pengembangan dan pemberdayaan komunitas-masyarakat berbasis aset-kekuatan. Konsep inti tersebut diantaranya adalah memiliki kendali lokal atas proses pembangunan, mempertimbangkan nilai budaya secara sungguh-sungguh, mengapresiasi cara pandang dunia, dan menemukan keseimbangan antara sumber daya lokal dan eksternal.

Aset dan kekuatan yang sebelumnya terabaikan atau bahkan dianggap sebagai penghalang dalam pembangunan, namun dengan pembangunan endogen dapat mengubah aset-aset tersebut menjadi aset penting yang dapat dimobilisasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan. Metode ABCD ini menekankan dan menjadikan aset-aset tersebut sebagai salah satu pilar pembangunan. Menurut kerangka pembangunan *endogen*, aset-aset tersebut

kemudian menjadi bagian dari prinsip pokok dalam pendekatan ABCD yang tidak boleh dinegasikan sedikitpun.

BUMDES Padabeunghar sebagai badan hukum yang baru dibentuk oleh pemerintah desa, yang mana pengurusnya merupakan masyarakat asli desa tersebut. BUMDES dapat menjadi motor penggerak pembangunan endogen. Aset-aset yang ada di desa dapat dihimpun dan dimobilisasi melalui wadah BUMDES untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program kerja yang dibuat BUMDES diupayakan melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dan juga menggunakan aset-aset yang ada di masyarakat, baik berupa aset individu, aset kelembagaan, aset ekonomi, maupun aset budaya dan aset sosial. Program kerja yang dibuat bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat des Padabeunghara, sehingga arus urbanisasi dapat ditekan. Pembangunan endogen menjadikan masyarakat desa makin berdaya, sehingga aset-aset yang dimiliki mampu dikelola dengan baik untuk dijadikan sumber pendapatan masyarakat desa.

7. Mengarah pada sumber energi (*Heliotropic*)

Heliotropic adalah istilah untuk menggambarkan proses berkembangnya tumbuhan yang condong mengarah kepada sumber energi. Demikian juga komunitas akan tumbuh mengarah pada sumber penghidupan.

Energi dalam pengembangan komunitas bisa beragam, diantaranya adalah mimpi besar yang dimiliki oleh komunitas, proses pengembangan yang apresiatif, atau keberpihakan anggota komunitas yang penuh totalitas dalam pelaksanaan program.

Mimpi-mimpi atau harapan-harapan besar dari seluruh elemen masyarakat dapat dihimpun dalam wadah BUMDES Padabeunghar yang baru terbentuk. Harapan-harapan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program kerja BUMDES yang melibatkan semua pihak atau seluruh elemen masyarakat desa, sehingga prinsip partisipasi dan kemitraan dapat terwujud. Totalitas dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat serta pengurus BUMDES diperlukan untuk melaksanakan program kerja dengan sungguh-sungguh agar tujuan bersama dapat tercapai.

Berdasarkan pertimbangan paradigma dan prinsip ABCD tersebut, maka pemberdayaan akan difokuskan pada pendampingan BUMDES sebagai badan usaha yang baru terbentuk. BUMDES sebagai lembaga resmi yang beranggotakan masyarakat asli Desa Padabeunghar (karang taruna) yang mengemban tanggung jawab memajukan desa dari aspek ekonomi sehingga masyarakat tidak perlu keluar dari desa untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini berdasarkan amanat UU Desa No.6/2014 bahwa setiap desa perlu membentuk BUMDES sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan

pendapatan asli desa (PAD). BUMDES merupakan lembaga yang paling memungkinkan untuk dapat melakukan penghimpunan aset-aset yang terdapat di Desa Padabeunghar dan dipandang mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan di desa. Oleh karena itu pendampingan terhadap BUMDES sangat diperlukan.

Pada pendampingan tahap awal, sangat penting menjadikan BUMDES sebagai badan usaha yang profesional, sehingga dalam hal ini BUMDES membutuhkan pengetahuan dan pelatihan dalam bidang manajemen khususnya pelatihan yang bertujuan mewujudkan tata kelola BUMDES yang baik dan penyusunan sistem perencanaan (program kerja) yang baik serta berkelanjutan.

Pelatihan yang dilaksanakan meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, penyuluhan dan *focus group discussion (FGD)*, dan pelaksanaan pelatihan (Rahim dan Mokoginta, 2017). Proses pengumpulan informasi ini dapat dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* guna menyerap informasi sebanyak-banyaknya mengenai potensi individu dan kelompok yang ada. Oleh karena itu, tim pengabdian terjun secara partisipatif di lapangan (Kristanto & Putri, 2021).

Tahap persiapan terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu *appreciate inquiry* dan *community map*. Pada tahap *appreciate inquiry* dilakukan identifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh komunitas dampingan (BUMDES Padabeunghar). Tim pengabdian melakukan FGD dengan pengurus BUMDES, karang taruna, dan tokoh masyarakat.

Kegiatan FGD ini menghasilkan informasi tentang potensi-potensi yang terdapat di Desa Padabeunghar sebagai lokasi dampingan sebagai berikut:

- a. Desa Padabeunghar memiliki alam yang indah
- b. Terdapat banyak objek wisata alam di sekitar Desa Padabeunghar
- c. Penduduk Desa Padabeunghar memiliki kebiasaan gotong royong
- d. Desa Padabeunghar juga memiliki beragam jenis hasil panen, seperti durian, melinjo, dan rempah-rempah
- e. Masyarakat Desa Padabeunghar sebagian memiliki usaha peternakan
- f. BUMDES baru terbentuk dan belum memiliki rencana program kerja yang baik dan tata kelola yang baik
- g. Kondisi karang taruna vakum, namun siap untuk aktif kembali jika didampingi

Tahap berikutnya dilakukan *community map* untuk meningkatkan pengetahuan komunitas dampingan mengenai aset dan potensi yang ada di wilayah maupun masyarakat Desa Padabeunghar, namun belum dikelola secara optimal dan baik, sehingga belum memberikan *benefit* (manfaat) bagi masyarakat.

Setelah proses persiapan selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan dan FGD melalui 2 (dua) tahapan, yaitu *transectoral* dan *organizational mapping*. Pada tahap *transectoral*, BUMDES mengidentifikasi aset-aset dan jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat yang memungkinkan untuk dijadikan mitra kerja sama dalam upaya mendukung pariwisata di Desa Padabeunghar. Berdasarkan hasil FGD, aset masyarakat yang dapat dikerjasamakan diantaranya rumah-rumah penduduk untuk kebutuhan home stay bagi wisatawan dan usaha-usaha (home industry) penghasil jamu, makanan ringan seperti emping melinjo, keripik-keripik buah, serta hasil pertanian seperti buah-buahan (durian dan lain-lain). Sedangkan pada tahap *organizational mapping* membahas tentang rencana pengembangan kapasitas organisasi (BUMDES) untuk memahami kebutuhannya, mengurangi ketidaktahuannya, mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Berdasarkan hasil FGD, didapati bahwa BUMDES yang baru terbentuk belum memahami cara pengelolaan organisasi dan menyusun program kerja yang baik sesuai dengan aset dan potensi yang dimiliki saat ini.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan pelatihan (praktik), meliputi kegiatan individual *inventory skill* dan *leaky bucket*. Pada kegiatan *inventory skill* dilakukan pembagian tugas dan wewenang (*job description*) bagi setiap pengurus BUMDES Padabeunghar sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut akan menentukan struktur yang perlu dimiliki oleh BUMDES dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Pada pelatihan tersebut dilakukan simulasi peran agar setiap pengurus harus memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing. Terkait dengan tujuan tersebut, maka materi pelatihan yang diberikan pada pendampingan ini terdiri dari 2 (dua) materi, yaitu materi pendampingan tata kelola BUMDES, diantaranya:

- a. Memahami fungsi, tugas, dan wewenang pemilik
- b. Memahami fungsi, tugas, dan wewenang pengawas
- c. Memahami fungsi, tugas, dan wewenang pengelola
- d. Menyusun struktur organisasi dan job description

Kegiatan berikutnya adalah *leaky bucket*, yaitu diskusi dengan seluruh pengurus BUMDES untuk menyusun sistem perencanaan yang baik, seperti penyusunan program kerja dan rencana anggaran. Materi pendampingan yang diberikan, diantaranya:

- a. Merancang program dan kegiatan
- b. Menyusun rencana anggaran biaya kegiatan
- c. Menyusun rencana bisnis dan anggaran

Pada sesi ini, pengurus BUMDES Padabeunghar diberikan kertas kerja (*worksheet*) untuk merinci program kerja yang akan dijalankan sekaligus biaya yang diperlukan untuk menjalankan program kerja tersebut serta rencana kerjasama dengan berbagai mitra. Berdasarkan informasi dari Ketua BUMDES Padabeunghar, program kerja yang rencananya akan dijalankan oleh BUMDES Padabeunghar diantaranya adalah bank sampah sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian alam Desa Padabeunghar yang merupakan dukungan sebagai desa penyangga wisata agar wisatawan yang datang merasa nyaman dan masyarakat pun memperoleh penghasilan dari bank sampah tersebut dan waserda (warung serba ada) yang menampung dan mengemas ulang produk-produk makanan maupun kerajinan tangan yang dihasilkan *home industry* di desa Padabeunghar untuk dipasarkan di objek-objek wisata di sekitar Desa Padabeunghar dan memanfaatkan jaringan kemitraan dengan BUMDES se-Kabupaten Kuningan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Desa Padabeunghar memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi desa penyangga wisata, diantaranya:
 - a. Aset individu, adanya masyarakat dan kompepar yang sudah mengikuti pelatihan kepariwisataan, diantaranya penghijauan, pemeliharaan alam, penataan alam, dan pengelolaan kepariwisataan yang baik
 - b. Aset fisik dan Sumber Daya Alam, adanya pemandangan alam yang indah dan asri, sarana prasarana yang memadai, namun infrastruktur jalan masih harus diperbaiki agar lebih luas
 - c. Aset Budaya dan Keagamaan, adanya budaya sedekah bumi, hajat bumi, panen raya, kelompok reog, kelompok seni seperti jaipong, pertunjukan wayang kulit, dan adanya kegiatan keagamaan, seperti tahlilan dan majelis ta'lim
 - d. Aset Ekonomi, adanya UMKM dan *home industry* yang menghasilkan produk makanan, kerajinan, dan aksesoris, serta baru terbentuknya BUMDES
 - e. Aset Modal Sosial, adanya kebiasaan gotong royong, sikap masyarakat yang sopan dan ramah.
2. Harapan-harapan masyarakat Desa Padabeunghar dalam memanfaatkan potensi aset yang dimilikinya, diantaranya yaitu adanya perbaikan infrastruktur dan akses jalan, pembinaan masyarakat agar kreatif dan produktif, menciptakan wisata yang religius, mendata lokasi di desa yang potensial menjadi objek wisata namun belum dikelola, BUMDES yang baru terbentuk diupayakan dapat menghimpun modal dan aset masyarakat desa untuk mengembangkan dan mempertahankan objek wisata yang sudah ada, UMKM dapat berjalan kembali pasca pandemi,

- adanya hiburan untuk wisatawan di objek wisata yang sudah terbentuk, diperlukan dukungan pemerintah desa untuk mengembangkan wisata di Padabeunghar, kelestarian alam harus terus dijaga, *home industry* yang sudah ada dikembangkan, budaya dan adat istiadat dilestarikan, pemerintah dapat mendukung modal untuk pengembangan pariwisata, kerjasama dengan TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) dalam pemeliharaan Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA), objek wisata yang sudah ada diharapkan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat di luar Desa Padabeunghar, studi banding wisata alam di daerah lain agar KOMPEPAR dan karang taruna dapat melakukan inovasi dalam bidang wisata alam, dapat menarik wisatawan mancanegara, sarana prasarana terus diperbaiki, dan SDM diberikan pelatihan kepariwisataan.
3. Pola Pendampingan yang sesuai untuk mendukung Desa Padabeunghar menjadi desa penyangga wisata yaitu pelatihan dan pendampingan BUMDES dalam bidang tata kelola BUMDES dan pelatihan sistem perencanaan yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM IAIN Syekh Nurjati yang telah memberikan dana hibah pengabdian kepada masyarakat, juga kepada karang taruna dan tokoh masyarakat Desa Padabeunghar, serta kelompok penggerak pariwisata yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat inisehingga dapat terlaksana dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Kuningan. Kuningan.
- Dhamotharan, M. (2009). *Handbook on integrated community development: Seven D approach to community capacity development*. Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization.
- Dureau, C. (2013). *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase 2
- Fitrianto, AR., *et al.* (2020). Optimalisasi Potensi Desa Wisata Edukasi di Ledug Prigen. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri*, 4 (2): 276-284.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.

- Hidayah dan Rahayu. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kretzmann, J. & McKnight, J. P. (1996). Asset-based community development. *National Civic Review*, 85(4), 23-29.
- Kristanto, h. B., & Putri, A. A. (2021). Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 43-54.
- Naben, M. I. (2021). *Pengetahuan dan Harapan Masyarakat Desa Penyangga terhadap Rencana Perubahan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Sermo Kabupaten Kulon Progo* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nafisah, Z., & Ansori, M. (2019). Pemberdayaan Potensi Desa Wisata River Walk di Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. *Warta Pengabdian*, 157-163.
- Nurhidayati SE dan Fandeli C. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu, Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012.
- Nurhidayati, S. E. (2015). Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjutan. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 28(1).
- Rizkianto, N dan Topowijono. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58 (2).
- Salahuddin, N. (2015). *Panduan KKN*. Surabaya.
- Sherraden, M. (2006). *Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Suksmawati, H., Alidyan, M., Roziana, F., & Firdaus, P. (2020). Besek Tegaren: ABCD, CBT, dan Glokalisasi dalam Satu Kemasan. *Sawala*, 9-18.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Wahyuningsih N dan Djuwita D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. IAIN Syekh Nurjati. Cirebon.

Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 9 (2): 323-334.